

RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

- Hari : R a b u
Tanggal : 24 Oktober 2018
Pukul : 10.40 s/d 11.35 Wib
Acara : 1. Penyampaian laporan hasil pembahasan dari Badan Anggaran terhadap KUA dan PPAS Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.
2. Penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Penetapan Persetujuan Ranperda diatas menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.
4. Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.
5. Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Agus Wibowo
3. H. Tri Jono, S.Kom, MM
4. Daeng M. Yatir, SH
5. Zulfaefi, SE
6. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
7. Ir. Arif Jumana S
8. Hj. Siti Maryani, S.Kom
9. Muttaqin
10. Hesti Gustrian, S.ST
11. Eddy Tiawarman, SP
12. Azman, SE
13. Agustinus Purba, ST
14. H. Lamén Sarihi, SH, MH
15. Zulkifli, S.Pd
16. Umar Ali Rangkuti, A.Md
17. Andreas Salim
18. H. Amran, S.IP
19. Bani Suparti, A.Md
20. Drs. Muhammad Zuhdi
21. Hasriawady, S.IP
22. Drg. Raja Miskal

Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP

Sekretaris : Drs. Edi Yusri

- Turut Hadir : 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
3. Setda Kabupaten Bintan

4. Pimpinan OPD Kabupaten Bintan
5. Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab Bintan
6. Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan
7. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan, Rabu 24 Oktober 2018 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Dari Mantang menuju air gelubi
Singgah kepasar membeli burung dara
Selamat datang, kita bertemu kembali
Dalam acara sidang rapat Paripurna
Pohon jati tumbuh di halaman
Dahannya lurus dibuat papan
Penandatanganan Nota akan dilakukan
Sebagai landasan membangun Bintan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Bintan. Yang terhormat Wakil Bupati Bintan. Yang terhormat para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Pimpinan Perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta lainnya se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara para Camat, Lurah/ Kepala Desa se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Pimpinan BUMN, BUMD dan Swasta lainnya. Yang terhormat saudara Rekan-rekan Wartawan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama dan yang utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita masih dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat bertemu kembali di ruang Sidang Paripurna ini dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan acara :

1. Penyampaian hasil laporan Badan Anggaran terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.
2. Penyampaian hasil laporan Pansus terhadap ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Penetapan persetujuan Ranperda menjadi Perda Kabupaten Bintan.
4. Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.
5. Penyerahan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama dan Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Unsur Pimpinan DPRD kepada Bupati Bintan
6. Penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap :
 - a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.
 - b. Peraturan Daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna dewan pada hari ini.

Bupati dan hadirin sidang Paripurna yang kami muliakan.

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan No.004/KPTS/DPRD-BINTAN/2016 pasal 84 ayat 2 point b dikatakan Rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD Bintan.

Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggota DPRD Bintan dengan perincian hadir 19 orang, karena Anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim maka rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu tanggal 24 Oktober 2018 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Bupati dan hadirin sidang Paripurna yang kami muliakan.

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini berpedoman kepada prioritas dan sasaran pembangunan yaitu rencana dan program kegiatan prioritas pembangunan di daerah, KUA PPAS ini juga merupakan landasan didalam penyusunan Rancangan APBD.

Sebagaimana kita ketahui bersama pada tanggal 31 Juli 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD. Kemudian dilakukan pula pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 secara bersama oleh Tim Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan Bersama TAPD dan OPD terkait.

Dan pada hari ini tanggal 24 Oktober 2018, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 masing masing akan disepakati dan ditandatangani bersama didalam sebuah Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan didalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 88 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian pula Paripurna penyampaian Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan telah disampaikan oleh Bupati Bintan pada tanggal 4 April 2018 yang lalu. Dan telah dilaksanakan beberapa kali tahapan rapat dan pembahasan serta penyempumaan kembali oleh Pansus Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan Eksekutif.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari pihak-pihak terkait, baik Tim Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan bersama TAPD atas pembahasannya terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dan Tim Pansus Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Protokol :

Penyampaian hasil laporan Badan Anggaran terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019. Kepada Bapak Sekretaris Badan Anggaran disilahkan.

Drs. Edi Yusri / Sekretaris Badan Anggaran :

Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan hasil pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Camat / Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan ini, perkenankanlah kami mengajak para hadirin sekalian untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD, dalam keadaan sehat wal'afiat, sejahtera lahir maupun bathin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan dalam forum yang terhormat ini, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang telah bekerja keras serta mengedepankan asas efisiensi dan efektifitas, sehingga dapat dicapai kesamaan pandang dalam mencermati dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dalam pembahasan tersebut sampai dengan ditanda tangannya Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 pada hari ini.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, dengan menekankan pada anggaran berbasis kinerja, setiap alokasi biaya yang dikeluarkan harus berkaitan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang dicapai, tentunya juga dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 ini diselaraskan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, hasil reses maupun pokok-pokok pikiran.

Secara garis besar Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 didasari atas sejumlah asumsi pada APBD Tahun Anggaran 2018, diajukan pada dokumen KUA dan PPAS sebesar **Rp.1.006.789.525.085**, (1 triliun 6 miliar 789 juta 525 ribu 85 rupiah) pada pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD disepakati adanya penambahan sebesar **Rp.43.543.630.000,00,-** (43 miliar 543 juta 630 ribu rupiah) sehingga jumlah Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sebesar **Rp.1.050.333.155.085,00,-** (1 triliun 50 miliar 333 juta 155 ribu 85 rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diajukan sebesar **Rp.257.763.035.085,00,-** (257 miliar 763 juta 35 ribu 85 rupiah) disepakati adanya kenaikan sebesar **Rp.3.543.630.000,00,-** (3 miliar 543 juta 630 ribu rupiah) yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar

- Rp.4.791.230.000,00** (4 miliar 791 juta 230 ribu rupiah) sedangkan untuk Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar **Rp.1.247.600.000,00,-** (1 miliar 247 juta 600 ribu rupiah) sehingga proyeksi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.261.306.665.085,-** (261 miliar 306 juta 665 ribu 85 rupiah), dibandingkan PAD pada APBD Tahun Anggaran 2018 yang berjumlah **Rp.254.800.605.285,00** (254 miliar 800 juta 605 ribu 285 rupiah) terdapat kenaikan sebesar **Rp.6.506.059.800,00-** (6 miliar 506 juta 59 ribu 800 rupiah) atau 2,55 persen.
2. Dana Perimbangan terdapat peningkatan sebesar **Rp.40.000.000.000,00** (40 miliar rupiah) dari proyeksi KUA dan PPAS sebesar **Rp.653.872.576.000,00** (653 miliar 872 juta 576 ribu rupiah) menjadi **Rp.693.872.576.000,00** (693 miliar 872 juta 576 ribu rupiah), kenaikan ini bersumber dari Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan dari proyeksi KUA dan PPAS, yakni sebesar **Rp.484.586.669.000,00** (484 miliar 586 juta 669 ribu rupiah) demikian juga dengan Dana Alokasi Khusus yang diproyeksikan sebesar **Rp.123.177.913.000,-** (123 miliar 177 juta 913 ribu rupiah). Dibandingkan Dana Perimbangan pada APBD Tahun 2018 yang berjumlah **Rp.653.872.576.000,00** (653 miliar 872 juta 576 ribu rupiah) terdapat kenaikan sebesar **Rp.40.000.000.000,00** (40 miliar rupiah) atau 6,12 persen.
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga tidak mengalami perubahan, yakni sebesar **Rp.95.153.914,000** (95 miliar 153 juta 914 ribu rupiah).
 4. Dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2018 yang berjumlah sebesar **Rp.1.003.827.095.285,00** (1 triliun 3 miliar 827 juta 95 ribu 285 rupiah) maka proyeksi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar **Rp.46.506.059.800,00** (46 miliar 506 juta 59 ribu 800 rupiah) atau 4,63 persen.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada rancangan KUA dan PPAS diproyeksikan sebesar **Rp.1.076.728.588.734,00** (1 triliun 76 miliar 728 juta 588 ribu 734 rupiah), pada pembahasan disepakati adanya kenaikan sebesar **Rp. 61.979.284.000,00** (61 miliar 979 juta 284 ribu rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah pada APBD Tahun 2019 direncanakan sebesar **Rp.1.138.707.872.734,00** (1 triliun 138 miliar 707 juta 872 ribu 734 rupiah), asumsi Belanja Daerah tahun 2019, sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung pada proyeksi KUA dan PPAS sebesar **Rp.522.845.192.834,00** (522 miliar 845 juta 192 ribu 834 rupiah) hasil pembahasan disepakati adanya penambahan sebesar **Rp.38.726.000.000,00,-** (38 miliar 726 juta rupiah) sehingga jumlah Belanja Tidak Langsung pada proyeksi APBD Tahun 2019 sebesar **Rp.561.571.192.834,00** (561 miliar 571 juta 192 ribu 834 rupiah), penambahan tersebut, dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar **Rp.36.000.000.000,00,-** (36 miliar rupiah), Belanja Hibah terdapat pengurangan sebesar **Rp.130.000.000,00,-** (130 juta rupiah), Belanja Bantuan Sosial pengurangan sebesar **Rp.1.144.000.000,00,-** (1 miliar 144 juta rupiah), Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik terdapat penambahan sebesar **Rp.4.000.000.000,00,-** (4 miliar rupiah), untuk Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan, yakni sebesar **Rp.2.000.000.000,00** (2 miliar rupiah). Jika dibandingkan pada tahun 2018 yang berjumlah **Rp.497.532.156.860,11** (497 miliar 532 juta 156 ribu 860 rupiah 11 sen) maka Belanja Tidak Langsung pada proyeksi APBD Tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar **Rp.64.039.035.973,89** (64 miliar 39 juta 35 ribu 973 rupiah 89 sen) atau 12,87 persen.

2. Belanja Langsung pada proyeksi KUA dan PPAS sebesar **Rp.553.883.395.900,00-** (553 miliar 883 juta 395 ribu 900 rupiah), hasil pembahasan disepakati adanya penambahan sebesar **Rp.23.253.284.000,00** (23 miliar 253 juta 284 ribu rupiah), sehingga jumlah Belanja Langsung pada proyeksi APBD Tahun 2019 disepakati sebesar **Rp.577.136.679.900,00** (577 miliar 136 juta 679 ribu 900 rupiah), penambahan Belanja Langsung ini dialokasikan untuk beberapa kegiatan di OPD yang bersifat prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2019.
3. Untuk Urusan Wajib bidang Pendidikan dan Kesehatan, pada proyeksi APBD Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai amanat dari peraturan Perundang-undangan, dengan proyeksi untuk bidang Pendidikan sebesar 22,31 persen dan Kesehatan sebesar 10,49 persen. Jika dibandingkan Belanja Langsung pada APBD Tahun 2018 yang berjumlah **Rp.569.345.256.929,85**, (569 miliar 345 juta 256 ribu 929 rupiah 85 sen) terdapat kenaikan sebesar **Rp. 7.791.422.970,15** (7 miliar 791 juta 422 ribu 970 rupiah 15 sen) atau sebesar 1,37 persen.
4. Secara keseluruhan Proyeksi Belanja Daerah pada APBD Tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar **Rp.71.830.458.944,04** (71 miliar 830 juta 458 ribu 944 rupiah) dari APBD Tahun 2018 yang berjumlah **Rp.1.066.877.413.789,96** (1 triliun 66 miliar 877 juta 413 ribu 96 rupiah) atau sebesar 6,73 persen.

C. Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah didasari atas beberapa asumsi berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD 2019 diproyeksikan sebesar **Rp.90.374.717.649,00** (90 miliar 374 juta 717 ribu 649 rupiah), terdapat kenaikan sebesar **Rp.25.324.399.144,04** (25 miliar 324 juta 399 ribu 144 rupiah 4 sen) dari APBD Tahun 2018 yang berjumlah **Rp.65.050.318.504.96** (65 miliar 50 juta 318 ribu 504 rupiah 96 sen) atau 38,93 persen.
2. Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (2 miliar rupiah) untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini kami mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan daerah, peningkatan ini menjadi wujud kerja keras dan komitmen dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun upaya untuk terus menaikkan pendapatan daerah ini harus terus dilakukan melalui upaya intensifikasi, optimalisasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan, khususnya pada bidang Pendidikan dan Kesehatan, namun demikian Belanja Modal harus tetap mendapatkan prioritas pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, karena belanja modal menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk menjadi perhatian kita bersama untuk Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD ini, hendaknya mempedomani peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, seharusnya KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 ini disepakati paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2018. artinya penandatanganan Nota Kesepakatan ini sebenarnya sudah melampaui waktu yang telah ditentukan pada Permendagri tersebut.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Kami segenap Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, mengucapkan terima kasih kepada segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan, TAPD Kabupaten Bintan, seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan atas kerjasamanya sehingga pembahasan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 ini berjalan lancar dan aspiratif. Demikian laporan Badan Anggaran yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan ini, dan terima kasih atas segala perhatian.

Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do'a semoga Allah SWT senantiasa selalu memberi petunjuk menuju jalan yang diridhoi-Nya, serta selalu memberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas-tugas kita untuk membangun Kabupaten Bintan lebih maju dan sejahtera. Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 24 Oktober 2018. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, **H. Nesar Ahmad, S.IP** ditandatangani. Sekretaris, **Drs. Edi Yusri** ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian hasil laporan Panitia Khusus terhadap Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepada Bapak Sekretaris Panitia Khusus disilahkan.

Muttaqin / Sekretaris Panitia Khusus :

Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Kepala Dinas/Badan/Kantor dan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, termasuk nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga kita dapat bertemu pada rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian laporan Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Hadirin sidang Paripurna yang kami hormati,

Ijinkanlah pada kesempatan ini, kami dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan laporan kegiatan Pansus terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berlangsung sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d 21 Desember 2015.

Bagian I
Pendahuluan

Salah satu alasan yang mendasari lahirnya Peraturan Daerah adalah implikasi perubahan paradigma manajemen Pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Perda disusun karena adanya kebutuhan yang disesuaikan dengan karakter daerah. Oleh sebab itu, Kabupaten Bintan sebagai Daerah Otonom diberi kewenangan mengurus daerahnya sendiri, salah satunya adalah dengan membuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hewan sebagaimana karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak serta melindungi kesehatan masyarakat. Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan dasar hukum untuk pengaturannya sehingga terbentuklah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian II

Tujuan Pembahasan dan Mekanisme Pembahasan

A. Tujuan pembahasan

Mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna sebagai Peraturan Daerah.

B. Mekanisme Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan mekanisme :

1. Rapat internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan
2. Penyamaan persepsi antara anggota Panitia Khusus dan Tim Pemerintah Daerah tentang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis atas Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Pembahasan substansi Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bintan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Bintan
4. Penyampaian pandangan fraksi pada rapat Panitia Khusus
5. Penyampaian laporan Panitia Khusus terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna

Bagian III

Hasil Pembahasan

Dari hasil rapat internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan maupun bersama Tim Eksekutif Pemerintah Daerah, dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa perubahan seperti perbaikan penulisan, penambahan maupun penghapusan materi yang terdapat dalam Ranperda tersebut, maka Panitia Khusus beserta Tim Eksekutif Pemerintah Daerah telah melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain sebagai berikut :

1. Penambahan nomor pada konsideran mengingat yaitu nomor 21 dan 22, sehingga nomor berikutnya berubah dan menyesuaikan
2. Pasal 1 ayat 12 di drop/ dihapus, sehingga ayat berikutnya menyesuaikan

3. Penambahan definisi pada pasal 1 ayat 12, 13, 14, dan 15, sehingga ayat berikutnya menyesuaikan
4. Perubahan pada pasal 22 ayat 2 huruf a dan huruf b
5. Perubahan pada pasal 22 ayat 3
6. Pasal 25 ayat 4 huruf b di drop/ dihapus, sehingga huruf berikutnya menyesuaikan
7. Perubahan pada pasal 25 ayat 4 huruf a dan huruf b
8. Perubahan pada pasal 25 ayat 6
9. Perubahan pada pasal 48 huruf c pada halaman penjelasan
10. Perubahan pada pasal 56 ayat 3 huruf b pada halaman penjelasan
11. Pasal 56 ayat 4 huruf b di drop/ dihapus, sehingga huruf berikutnya menyesuaikan
12. Perubahan pada pasal 59 ayat 2 huruf g dan huruf h
13. Pasal 60 di drop/ dihapus, sehingga pasal berikutnya menyesuaikan
14. Perubahan pada pasal 63 ayat 1

Adapun perubahan-perubahan pada Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada laporan ini.

Bagian IV Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan. Daerah melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.

Semoga dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat dan memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan

B. Rekomendasi

Berdasarkan rekomendasi dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka semua fraksi menerima dan menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

Semua rekomendasi Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan terlampir.

Bagian V Penutup

Demikian laporan ini kami sampaikan dihadapan Rapat Paripurna yang terhormat ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada kami. Dan terima kasih kepada Tim Eksekutif Pemerintah Daerah atas kerjasamanya selama ini.

Semoga dengan disahkannya Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini, dapat menjadikan daerah kita semakin berkembang dalam bidang peternakan. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 24 Oktober 2018. Panitia Khusus tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, **Umar Ali Rangkuti, A.Md** ditandatangani. Sekretaris, **Muttaqin** ditandatangani.

Protokol :

Penetapan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Setelah bersama-sama kita mendengarkan hasil laporan Badan Anggaran terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019. Dan khusus laporan Panitia Khusus Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka pada prinsipnya Menerima dan Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Namun demikian kami akan tanyakan juga kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan yang terhormat, apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah dapat kita setujui menjadi Peraturan Daerah ?

Anggota Dewan :

Setujuuuuu.....

..... Palu diketok 1 (satu) kali

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Alhamdulillah baru saja kita menyetujui penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, semoga dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat mewujudkan lingkungan Kabupaten Bintan yang baik dan sehat melalui kesadaran dan kepedulian Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan bidang usaha peternakan. Kami atas nama unsur Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Bintan menghimbau kepada Pemerintah Daerah, dan seluruh lapisan masyarakat Bintan yang kita cintai ini, untuk tetap komitmen menjalankan dan melaksanakan semua Peraturan Daerah yang ada, ini semua demi mendukung tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bintan, yang lebih baik lagi dimasa mendatang dalam rangka Bintan yang gemilang.

Protokol :

Unsur Pimpinan, Bupati, Wakil Bupati Bintan serta didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala BP3D, Kepala DPKAD disilahkan untuk mengambil tempat. Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019.

(Pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019)

Dilanjutkan dengan penyerahan dari Pimpinan DPRD kepada Bupati Bintan.

(Pelaksanaan penyerahan dari Pimpinan DPRD kepada Bupati Bintan)

Unsur Pimpinan dan Bupati serta Wakil Bupati disilahkan kembali ke tempat.

Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

H. Apri Sujadi, S.Sos / Bupati Bintan :

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan; Yang saya hormati saudara Wakil Bupati Bintan; Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan; Yang saya hormati, saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Yang saya hormati Staf Ahli, Para Asisten, Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 dan pengesahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Sungguh merupakan hal yang membanggakan bagi kita semua, bahwa proses penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, telah dapat dilakukan melalui penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap dokumen perencanaan pembangunan, dan telah tercapai kesepakatan yang akan segera kita laksanakan merupakan momen yang penting dalam tahapan penganggaran pembangunan, yang tercermin dari program dan kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rancangan KUA dan PPAS yang mengacu pada RKPD, sejalan dengan pencapaian misi dalam RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 pada APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pemanfaatan infrastruktur di pulau-pulau serta pemanfaatan potensi dasar perekonomian rakyat, kebijakan yang diambil meliputi :

1. Memantapkan kondisi infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah terutama di pulau-pulau;
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan daya tarik produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Bintan;
4. Memperkuat KUMKM dari sisi kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar;
5. Meningkatkan daya saing industri baik skala lokal, nasional maupun internasional;
6. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi dan perdagangan pasar dalam negeri maupun luar negeri;
7. Menciptakan dan memanfaatkan ketahanan pangan;
8. Memantapkan penataan ruang wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Bintan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan.

Hingga akhir tahun 2020 pencapaian misi dalam RPJMD Kabupaten Bintan dapat terlaksana dengan baik.

Saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bentuk peran Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengatasi permasalahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, mencegah dan mengendalikan zoonosis (penyakit yang menular dari hewan ke manusia) dan terpenuhinya kecukupan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (asuh) di Kabupaten Bintan. Adapun hal terpenting dalam Ranperda ini dimana arah pengembangan sentra peternakan dapat dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten Bintan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah, sehingga kedepan diharapkan Kabupaten Bintan dapat menjadi pemasok sumber pangan dari hasil peternakan baik di Kepulauan Riau maupun nasional.

Ranperda mengatur tentang pemotongan hewan melalui Rumah Potong Hewan (RPH) baik yang diselenggarakan dari Pemerintah Daerah maupun Swasta, sehingga menjamin hak konsumen terutama akan produk hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (asuh). Dan dari sisi kesehatan hewan serta penanganan hewan dengan kaidah kesejahteraan hewan dan penguatan kelembagaan otoritas veteriner.

Saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang turut serta dalam pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga pada akhirnya dapat disepakati bersama.

Demikian disampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Sebelum saya akhiri, perkenankanlah saya menyampaikan dua bait pantun:

Pohon selasih tumbuh ditaman

Diambil budak untuk buat minuman

Apresiasi dan terimakasih kami ucapkan

Ranperda akhirnya dapat disahkan

Pemda dan bangga kerjanya beres

Alhamdulillah hari ini penetapan kua ppas

Penyusunan apbd 2019 agar segera diproses

Semoga penetapan apbd 2019 nantinya sukses

Terimakasih atas perhatiannya, akhir kata billahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 24 Oktober 2018. Bupati Bintan, **H. Apri Sujadi, S.Sos** ditandatangani.

Protokol :

Penutupan rapat Paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada saudara Bupati Bintan yang telah menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019. Dan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bintan. Demikian rangkaian acara pada hari ini yang telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin undangan dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamiin rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan ini resmi saya nyatakan di tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan 3 (tiga) bait pantun, yakni :

Ke telok sebong membeli belati
Belati kepunyaan tuan hanapi
Nota KUA PPAS sudah ditandatangani
APBD 2019 segera ditindaklanjuti
Cik mamat menanam pisang berangan
Mencangkul lahan dibelakang rumahnya,
Penyelenggaraan peternakan sudah diperdakan
Jalankan pengawasan sesuai dengan tugasnya
Membeli kue di jalan sumatera
Tak lupa membeli sibuah pepaya
Terima kasih atas kehadiran saudara
Maafkan bila tersilaf penyampaiannya

Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Protokol :

Demikian Rapat Paripurna pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 11.35 wib.

Notulis,


NETTY NURZANNAH, A.Md
NIP.19701107 200604 2 006

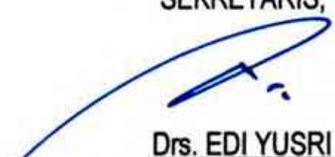
Kabag Persidangan, Risalah dan Hukum


RAMLAH, S.Sos
NIP.19711106 199803 2 009

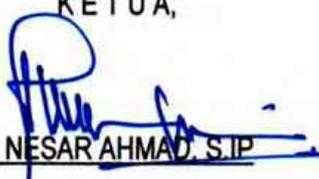
Kasubag Risalah dan Persidangan


RONY FRANTIKA, S.Sos
NIP.19760112 200604 1 015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,

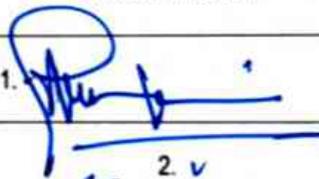
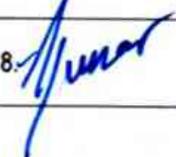

Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19671108 199002 1 004

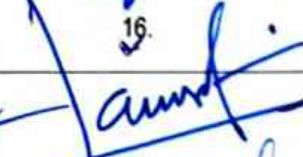
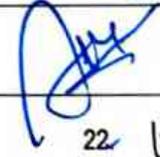
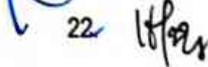
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,


H. NESAR AHMAD, S.IP

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019

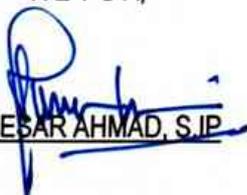
Hari : Rabu
 Tanggal : 24 Oktober 2018
 Waktu : 10.40 s/d 11.35 wib
 Acara : 1. Penyampaian laporan hasil pembahasan § Badan Anggaran terhadap KUA & PPAS APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.
 2. Penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 3. Penetapan Persetujuan Ranperda diatas menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
 4. Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
 5. Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap KUA & PPAS Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. ✓
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. ✓
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5. ✓
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. ✓ 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. ✓
8	Ir. ARIF JUMANA S	WAKIL KETUA KOMISI II	8. 
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. ✓ 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10.
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 

14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 
15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15. 
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17. 
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. 
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21. 
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. 
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23.
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	25.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
K E T U A,


H. NESAR AHMAD, S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

- Hari : Rabu
 Tanggal : 24 Oktober 2018
 Waktu : 10.40 s/d 11.35 wib
 Acara : 1. Penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap KUA & PPAS APBD Kabupaten Bintan tahun Anggaran 2019.
 2. Penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 3. Penetapan Persetujuan Ranperda diatas menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
 4. Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
 5. Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap KUA & PPAS Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. M. Manan	Sebutanis	1.
2.	Indrah Putri Utami	BPS Kab. Bintan	2.
3.	Adina Khairunnisa	KPS Kab. Bintan	3.
4.	Euningsih	Kari Petern. Duma	4.
5.	Yohana	Kasi Pemb. Kelog	5.
6.	R. Nava Mgaseni	Kasie Pelayanan	6.
7.	Jenny Elira	Kabid PEMPUS	7.
8.	M. Syarifur	Kabid Jantehsas	8.
9.	Anggrani	Kasi Petern. Duma	9.
10.	Riki Ronaldo	Kasi	10.
11.	Natili Suwanti	Kari Pengawasan DKP	11.
12.	Drs. Rini	Kasi Kelengkapan DKS	12.
13.	Grosow Rena SS	Kasi Kelengkapan DKS	13.
14.	MARDIAH	KABID PK KBBP	14.
15.	Koryanti	Subretaris PINSOL	15.
16.	Rita Iman	Kasi Peternakan	16.
17.	Dr. Ben. Kurny	KASID	17.
18.	Mandawati	Kasi DKP	18.
19.	ANGRAD V	BAG. PEMERINTAHAN	19.

20.	R. Jhon Kurnadi		20.	
21.	Elly Lurnian		21.	
22.	Natti.S	DLH KAD Bmbu	22.	
23.	R. LUKMAN	DP. EKB	23.	
24.	RAMLI	DKP.	24.	
25.	SEKE MARSI TA	DKP.	25.	
26.	LITRIZAL	DU DAR.	26.	
27.	Dian Erfanita	DKUPP.	27.	
28.	Wan Rita A.	Distan	28.	
29.	Im Rezeki	Insas	29.	
30.	Ety Sunyi	DPMPDPTK	30.	
31.	Zafre	DPMPDPTK	31.	
32.	Haryanti	BPBD / Sekretaris	32.	
33.	Nurhayati	Lurah Teres	33.	
34.	ELINDA	sekretaris ap3kb	34.	
35.	rauci	Kasubag keu ap3kb	35.	
36.	Untuy	SGK Dirka	36.	
37.	Zamal Katan	Joh. BKPPD	37.	
38.	Segeng jumar	PUPR	38.	
39.	IRIANTO	DISDULCAPIL	39.	
40.	Khamisah	BKPPD	40.	
41.	SEI MARTINI	KESBANGPOL	41.	
42.	HATRIAH	BKAD	42.	
43.	M. HASYIM	OLTI	43.	
44.	Rony Frankilog	Satuan	44.	
45.	EVIS SUMARTINI	sek Disbudpora	45.	
46.	SILVIA	Disbudpora	46.	
47.	ZULFIKAR ASMAH	KABID PERUMAHAN	47.	
48.	Nepy Purwanto	Lurah Tappaya aksi	48.	
49.	ERLECAWATI	BP3D	49.	
50.	Zulkhairi	Camat Bingsir	50.	

51.	EDI CANDRA	Kasubid Pijon DSTB/PORNO	51	
52.	Mirpano	Kasubid Pabe	52	
53.	SUKRINO	Kasubid Perencanaan	53.	
54.	APRILIA KACHAN	Kasubid L01	54.	
55.	Mujid	Kabag Umum	55.	
56.	Hafsi Handra S.ST.	Kabag Protokol.	56.	
57.	Arpa Sumantha	Kabag Kominfo.	57.	
58.	SRI HENY	TLK PERBONG	58.	
59.	Gylva Purnama	Kasubid P.Km. Bn	59.	
60.	ARDIANUSAH	KASUBID PEMB. & PENYALAMAN CINEJA BKPTD	60.	
61.	Dian Melivia	Kasubid Bulet Pegawai	61.	
62.	RAHADIANSAH FAJAR	Kasubid Hukum	62.	
63.	Daniel Zulqys	Kasubid Satpol	63.	
64.	SAMUEL	Sab. Satpol	64.	
65.	M. Ali B.	Bosme	65.	
66.	Kartika	Ka OPSIKOR	66.	
67.	Sih Hartani	Kesbang pol.	67.	
68.	Jozail		68.	
69.	HISTAM EPELON	Kasi Peserta Akad. Disdik	69.	
70.	Muh. Lukman	Kabag Kesra	70.	
71.	XIASLAINI	Kadid Lujawor Dura	71.	
72.	Zultra Anur	Kasubid Jaminan Sosial	72.	
73.	SACARIN	Kasubid LUGAS	73.	
74.	Indriati K	Kasubid PPH Duta	74.	
75.	dik. Wan Beni Prima	Kasubid Kesehatan Hewan	75.	
76.	dik. Florensia	Kasubid Kesmasvet	76.	
77.	Dra Dwi Mery Wn	Kabid PP PA	77.	
78.	Elisa Fikri	Kabid PP & PUG	78.	
79.	CRI HENTUTI	Kasubid PP	79.	
80.	Elvik Novy	Kasubid UMUM SATPOL	80.	
81.	Indriani	Kasubid ...	81	

82.	Nonny Sunati	Kasubag. Kau Satpol	82. <i>[Signature]</i>
83.	Ryan Tarburan	Program DP3KB	83. <i>[Signature]</i>
84.	Juliana Siswanti	Kasi PUG DP3KB	84. <i>[Signature]</i>
85.	Kusno Tarosina	Kasubbag Program	85. <i>[Signature]</i>
86.	Yulfa Fatma	Kasi Distribusi & Harsa Pansan	86. <i>[Signature]</i>
87.	Dony Hadhanata	Sekretaris Bappeda	87. <i>[Signature]</i>
88.	LISANIO	Kasubag Pemas	88. <i>[Signature]</i>
89.	MURITAYATI. N	Camat SKL	89. <i>[Signature]</i>
90.	Henika Silvia	Kabag Pn	90. <i>[Signature]</i>
91.	Riang Anggrani	Camat T-pap	91. <i>[Signature]</i>
92.	HENRIO K.	Kabag Pertanian	92. <i>[Signature]</i>
93.			93.
94.			94.
95.			95.
96.			96.
97.			97.
98.			98.
99.			99.
100.			100.
101.			101.
102.			102.
103.			103.
104.			104.
105.			105.
106.			106.
107.			107.
108.			108.
109.			109.
110.			110.
111.			111.
112.			112.